

## **BAB II**

### **HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX DAN MUNCULNYA GERAKAN NASIONAL**

#### **A. Politik Etika di Hindia Belanda**

Tahun-tahun permulaan abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia.<sup>24</sup> Politik Etis yang dasarnya adalah pertanggungjawaban moral pemerintah kolonial terhadap negeri jajahannya telah menciptakan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut meliputi berbagai sendi kehidupan, namun yang akan dibahas disini terutama perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Perubahan tersebut melahirkan gerakan nasional yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan.

#### **1. Perkembangan Politik**

Pada permulaan abad ke-20 pemerintah kolonial terkenal dengan sistem sentralisasinya yang ekstrem, birokrasinya yang kaku, dan otokrasinya yang mutlak.<sup>25</sup> Dengan adanya perubahan di dalam tata pemerintahan yang dimulai pada tahun 1903,

---

<sup>24</sup> Elsbeth Locher Scholten, *Etika yang Berkeping-keping*. Terj. Nicolette P. Ratih, Jakarta: Djambatan, 1996. hal.39.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal.43.

maka sistem desentralisasi mulai dilaksanakan, yang konsesinya di satu pihak memberi otonomi lebih banyak kepada pemerintah daerah dan di lain pihak mendirikan badan-badan perwakilan.<sup>26</sup> Dengan desentralisasi tahun 1903 suatu proses yang jangkauannya lebih jauh telah dihayati dan telah meluas ke berbagai kehidupan Hindia Belanda.<sup>27</sup>

Dengan dibentuknya dewan-dewan rakyat, lembaga-lembaga tersebut menjadi wadah tempat latihan politik bagi banyak elit Indonesia dan juga dapat mendekatkan orang-orang Indonesia ini dengan cara-cara, aspirasi, dan pola-pola pemikiran Barat. Penekanannya adalah individu dan mendasarkan soal-soal keanggotaan, kekuasaan, dan hak-hak menurut ukuran Barat.<sup>28</sup> Dengan demikian majelis-majelis rakyat tidak dapat mencapai rakyat, karena mayoritas anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat di suatu pihak dan orang-orang Belanda di lain pihak.<sup>29</sup> Adanya desentralisasi ini telah memperbesar perbedaan pendapat di antara berbagai golongan di kalangan rakyat, yaitu semenjak mereka oleh pemerintah diperlakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip diskriminasi ras.<sup>30</sup> Walaupun demikian, desentralisasi merupakan suatu alat untuk merangsang kesadaran politik, terutama di kalangan elit dalam masyarakat Indonesia yang sudah dipengaruhi oleh Barat.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>27</sup> Robert Van Niel. *Op. Cit*, hal. 65

Berdasarkan Undang-undang Desentralisasi tahun 1903, dibentuklah Dewan-dewan Haminte (majelis-majelis rakyat) pada tahun 1905, dan Dewan Kabupaten pada 1908. Dewan-dewan daerah perkotaan umumnya beranggotakan orang Belanda, dan hanya di desa yang beranggotakan pribumi.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.65.

<sup>29</sup> Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit*, hal. 44.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.44.

<sup>31</sup> Robert Van Niel. *Op. Cit*, hal.65

Dengan diterimanya undang-undang mengenai *Volksraad* (Dewan Rakyat) oleh parlemen Belanda pada tahun 1916, maka berlakulah sistem perwakilan politik di Hindia-Belanda.<sup>32</sup> *Volksraad* didirikan sebagai lembaga dengan satu majelis yang hanya mempunyai wewenang untuk menasehati, tetapi kalau menyangkut masalah keuangan harus dikonsultasikan dengan Gubernur Jenderal.<sup>33</sup> Pada mulanya lembaga ini beranggotakan 39 orang dengan perincian terdiri atas 19 orang anggota yang dipilih (10 diantaranya adalah orang Indonesia), dan 19 orang anggota yang ditunjuk (lima diantaranya orang Indonesia), ditambah seorang ketua.<sup>34</sup>

Pada masa awalnya *Volksraad* merupakan sumber kecaman dan pertentangan terhadap pemerintah kolonial.<sup>35</sup> Mereka tidak puas dengan kekuasaan *Volksraad* yang terbatas dan menuntut adanya kekuasaan legislatif dan pertanggungjawaban kabinet secara penuh.<sup>36</sup> *Volksraad* juga tidak mempunyai pertanggungjawaban dan tidak memiliki hak-hak parlemen.<sup>37</sup> Bagi orang Indonesia, dengan didirikannya *Volksraad*, maka keinginan-keinginan politik secara resmi dapat disalurkan kepada pemerintah kolonial.<sup>38</sup> Badan ini merupakan tempat latihan kesadaran dan prosedur berpolitik bagi orang Indonesia tertentu, yang jumlahnya terbatas.<sup>39</sup> Orang Indonesia umumnya dan orang Eropa khususnya, terus menganggap *Volksraad* sebagai sesuatu yang harus menjadi tempat wakil rakyat Indonesia dan harus merupakan suatu forum

---

<sup>32</sup> Elsbeth Locher Scholten. *Op. Cit*, hal. 83

<sup>33</sup> M.C Ricklefs, *Op Cit*. hal. 243.

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 243.

<sup>35</sup> *Ibid.* hal. 244.

<sup>36</sup> Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit*, hal. 46.

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 47.

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 60.

<sup>39</sup> Robert Van Niel, *Op. Cit*, hal.176.

tempat mereka menyuarkan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan perundang-undangan.<sup>40</sup>

## 2. Perkembangan Ekonomi

Pada awal abad ke-20 perkebunan dan pertambangan mengalami masa gemilang.<sup>41</sup> Adanya kandungan-kandungan minyak bumi di daerah Langkat, Sumatera Utara telah diketahui sejak tahun 1860-an.<sup>42</sup> Pada tahun 1890 Belanda mendirikan *Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitasi van Petroleumbron in Nedelandsch-Indie* (Perusahaan Kerajaan Belanda Bagi Eksploitasi Sumber-sumber Minyak Bumi di Hindia-Belanda). Pada tahun 1900 perusahaan ini mengekspor minyak bumi ke kawasan-kawasan Asia. Pada tahun 1901 perusahaan tersebut memperluas kegiatan ke Kalimantan.<sup>43</sup> Pada tahun 1920-an terdapat kira-kira 50 perusahaan yang beroperasi di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.<sup>44</sup>

Dalam bidang perkebunan juga terjadi kemajuan yang pesat. Perkebunan yang terpenting di pulau Jawa ialah perkebunan tebu dan industri gula.<sup>45</sup> Dari tahun 1900 sampai 1930 produksi gula meningkat hampir empat kali lipat.<sup>46</sup> Kurang lebih 70 persen modal Belanda yang diinvestasikan di Hindia Belanda, terutama Jawa, separuhnya diinvestasikan pada perkebunan tebu. Pada awal abad ke-20 Jawa,

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hal.176.

<sup>41</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *Op. Cit*, hal. 35

<sup>42</sup> M.C Ricklefs. *Op. Cit*, hal.229.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *Op. Cit*, hal. 107.

<sup>46</sup> M.C Ricklefs, *Op. Cit*, hal.229.

terutama Jawa Timur merupakan salah satu penghasil gula yang terbesar di dunia.<sup>47</sup> Produksi tembakau berkembang pesat mulai tahun 1860-an, terutama di pesisir timur Sumatera. Produksi lada, kopra, timah, kopi, dan komoditi-komoditi perkebunan lainnya semakin meningkat, dan pada saat itu sebagian besar dikembangkan di daerah luar jawa.<sup>48</sup>

Dengan berkembangnya perusahaan perkebunan di Hindia-Belanda, menciptakan dualisme ekonomi di Hindia Belanda. Dalam artikelnya, *Ekonomi Asli dan Asing, Sama dan Berlainan*, Van der Kolff menjelaskan secara detail mengenai dualisme ekonomi yang terjadi di Hindia-Belanda.<sup>49</sup>

Dengan berkembangnya perekonomian pada awal abad ke-20 maka selama periode tahun 1900-1925 banyak kemajuan serta perubahan dan telah dijalankan, di antaranya adalah:

- a. Desentralisasi
- b. Perubahan-perubahan pemerintahan
- c. Perbaikan kesehatan rakyat dan emigrasi
- d. Perbaikan pertanian dan peternakan
- e. Pembangunan irigasi dan lalu lintas<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hal.230

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Artikel yang ditulis oleh G.H Van der Kolff pada tanggal 23 Juni 1941 yang diterbitkan dalam *Koloniaal Tijdschrift*. Dualisme disini adalah perpaduan antara ekonomi barat yang modern dengan ekonomi timur yang tradisional.

<sup>50</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *Op. Cit*, hal. 40.

### 3. Perkembangan Pendidikan

Sejajar dengan perkembangan perekonomian pada satu pihak dan perluasan bidang pemerintahan beserta administrasi di pihak lain, timbullah kebutuhan akan tenaga, baik dalam bidang administrasi maupun dalam berbagai bidang perekonomian dan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah kolonial lambat laun mendirikan sekolah-sekolah.<sup>51</sup>

Dari pemerintah kolonial terdapat dua pemikiran mengenai jenis pendidikan yang diterapkan untuk masyarakat. Snouck Hurgronje dan Direktur Pendidikan yang pertama, J. H. Abendanon, mendukung pendekatan yang sifatnya elit. Mereka lebih menginginkan pendidikan gaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya bagi kaum elit Indonesia yang dipengaruhi Barat. Tujuannya untuk menciptakan suatu elit yang berterima kasih dan bersedia bekerja sama, memperkecil anggaran belanja pemerintah, mengendalikan fanatisme Islam, dan menciptakan keteladanan bagi masyarakat. Sedangkan Gubernur Jendral Idenburg dan Gubernur Jendral Van Heutsz mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa pribumi sebagai bahasa pengantarnya bagi golongan bawah tersebut.<sup>52</sup>

Sistem pengajaran kolonial dibagi dalam dua jenis yaitu pengajaran pendidikan umum dan pengajaran kejuruan.<sup>53</sup> Pengajaran pendidikan umum terdiri atas sistem pengajaran setingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sekarang. Dalam sekolah dasar, terbagi dalam

---

<sup>51</sup> Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit.*, hal. 74.

<sup>52</sup> M.C Ricklefs. *Op. Cit.*, hal.236.

<sup>53</sup> Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit.*, hal. 79

dua kelas. Sekolah kelas I diberikan pengajaran kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau memiliki kekayaan, di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi pada umumnya.<sup>54</sup> Pada tahun 1914 sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*: pendidikan rendah yang lebih diperluas, semacam SLTP) didirikan untuk orang-orang Indonesia golongan atas, orang-orang Cina, dan orang-orang Eropa yang telah menyelesaikan sekolah dasar.<sup>55</sup> Pada tahun 1919 AMS (*Algemeene Middlebare School*: semacam SMA) didirikan untuk membawa para murid memasuki tingkat perguruan tinggi.<sup>56</sup> Baru pada tahun 1920-an didirikan perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Teknik atau *Technische Hooge School* (THS) di Bandung dibuka pada tahun 1922, Sekolah Tinggi Kedokteran atau *Geneeskundige Hooge School* (GHS) menyusul pada tahun 1927 di Jakarta, dan Sekolah Tinggi Hukum atau *Rechts Hooge School* (RHS) pada tahun 1924 juga di Jakarta.<sup>57</sup>

Selain pendidikan umum juga terdapat pendidikan kejuruan. Sekolah kejuruan yang terlebih dahulu didirikan adalah Sekolah Guru (*Kweekschool*), kemudian disusul pendirian sekolah untuk calon pegawai (pangreh praja) pribumi *Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren* (OSVIA) yang juga terkenal sebagai sekolah menak atau sekolah raja.<sup>58</sup> Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga paramedis dan medis pada pertengahan abad ke-19 didirikan sekolah Dokter Djawa, yang kemudian berkembang menjadi *School Tot Opleiding van Inlandsen* (STOVIA). Kemudian juga terdapat

---

<sup>54</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Op. Cit*, hal. 43.

<sup>55</sup> M.C Ricklefs. *Op. Cit*, hal.239.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit*, hal. 80.

<sup>58</sup> *Ibid.* hal.79.

sekolah kejuruan lain seperti: Sekolah Teknik, Sekolah Kehutanan, Sekolah Peternakan, Sekolah Dagang, dan Sekolah Hukum.<sup>59</sup>

Perkembangan pengajaran dengan sistem sekolahnya mau tak mau disesuaikan dengan sifat dualistis masyarakat Indonesia, baik mengenai bahasa pengantarnya maupun sistem pengajarannya. Maka dari itu terdapat empat kategori sekolah, yaitu:

1. Sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai model sekolah Belanda
2. Sekolah pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar
3. Sekolah pribumi yang memakai bahasa daerah/pribumi sebagai bahasa pengantar
4. Sekolah yang memakai sistem pribumi.<sup>60</sup>

Dengan berkembangnya Hindia Belanda khususnya pada awal abad ke-20 telah merubah kehidupan masyarakat. Dari golongan pribumi, timbul cendikiawan-cendikiawan baru yang menginginkan perubahan terutama untuk mewujudkan kemerdekaan. Perubahan yang diinginkan diiringi dengan pergerakan nasional yang mengakibatkan lahirnya gerakan nasional.

## **B. Lahirnya Gerakan Nasional**

Dalam historiografi Indonesia, pergerakan sering dilihat sebagai gerakan dimana sebuah bangsa yang sedang mencari identitas dan namanya, Indonesia, dan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.* hal.76



cita-cita nasionalnya, Indonesia merdeka.<sup>61</sup> Pergerakan dalam berbagai manifestasinya sudah dimulai sejak tahun 1905, dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI), namun yang paling monumental adalah dengan pembentukan organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Pergerakan disini meliputi semua macam aksi yang dilakukan dengan organisasi secara modern ke arah perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia, oleh karena tidak puasnya dengan keadaan masyarakat yang ada.<sup>62</sup> Pergerakan bukan hanya perbaikan hidup semata (aksi politik), tetapi juga menyangkut segi lain kehidupan (umpamanya hanya segi perekonomian, kebudayaan, agama, pengajaran). Pergerakan bukan hanya meliputi golongan-golongan kebangsaan, tetapi juga golongan agama dan ideologi (marxisme).<sup>63</sup> Pergerakan dipandang sebagai sebuah transisi, dengan pengertian bahwa telah ada gagasan nasional sekalipun belum benar-benar nasionalis. Arti pentingnya dalam sejarah hanya dapat dipahami melalui hasil yang kemudian dicapai, yaitu ditemukannya cita-cita nasional, Indonesia merdeka.<sup>64</sup>

Dalam buku *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pringgodigdo menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendorong terhadap lahirnya pergerakan nasional. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu yang datang dari dalam negeri dan dari luar negeri.

a. Faktor dari luar negeri

---

<sup>61</sup> Takashi Shiraishi. *Op. Cit*, hal. xi

<sup>62</sup> A.K Pringgodigdo. *Op Cit*, hal.VII

<sup>63</sup> *Ibid.* hal.VII

<sup>64</sup>Takashi Shiraishi. *Op. Cit*, hal.xii

Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang di semenanjung Liao Tung tahun 1905, yang merupakan bukti bahwa bangsa Barat bisa juga dikalahkan oleh bangsa Timur. Gerakan Turki Muda untuk mencapai perbaikan nasib, yang pada akhirnya menimbulkan revolusi pada tahun 1908 anti kaum konservatif. Itu semua merupakan sebab-sebab timbul dan lahirnya pergerakan Indonesia modern. Selain itu terdapat juga faktor-faktor hidup-tumbuhnya pergerakan. Adanya gerakan pan-Islamisme, revolusi Tiongkok tahun 1911, marxisme dan revolusi Bholsevik di Rusia, asas-asas perjanjian Versailles yang tidak dijalankan (hak mengatur bangsa sendiri), berdirinya *Volkenbond* dan *Labour-office*, dan pergerakan di India (nonkoperasi, swadeshi, civil disobedience). Semuanya itu memperkuat rasa kebangsaan, kemauan menjadi bangsa merdeka.

b. Faktor dari dalam negeri

Pada permulaan abad ke-20 telah timbul suatu rasa kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi yang terbelakang sebagai hasil dari kolonialisme maupun tradisionalisme. Dengan adanya diskriminasi dalam masyarakat, maka rakyat menjadi sadar akan ketidaksamaan hak-hak yang dimilikinya dan akan keadaannya yang terjajah itu. Oleh karena mereka akan menjadi sadar akan posisi mereka yang terbelakang itu, maka timbullah keinginan untuk maju dan kebutuhan akan pendidikan.<sup>65</sup> Banyak tersedianya sarana pendidikan pada abad

---

<sup>65</sup> Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit.*, hal. 58.

ke-20 menyebabkan bertambahnya jumlah kaum terpelajar di Indonesia. Kaum inilah yang menjadi pendorong tumbuh dan berkembangnya pergerakan nasional.<sup>66</sup>

Satu faktor lagi yang tak kalah penting adalah dengan dibentuknya *volksraad* (Dewan Rakyat) pada tahun 1916 yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut membicarakan masalah pemerintahan.<sup>67</sup> Dengan didirikannya Dewan Rakyat, maka keinginan-keinginan politik secara resmi dapat disalurkan melalui lembaga tersebut.<sup>68</sup>

### C. Penggolongan Organisasi

Pada masa pergerakan bermunculan banyak perkumpulan. Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang kehidupan lainnya seperti bidang sosial budaya. Dalam bukunya *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, AK Pringgodigdo menjelaskan secara lengkap mengenai penggolongan perkumpulan tersebut.<sup>69</sup>

#### 1. Perkumpulan berdasarkan politik

Perkumpulan berdasarkan politik merupakan perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk berpolitik. Perkumpulan berdasarkan politik dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, perkumpulan politik asli bangsa Indonesia baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan. Kedua, perkumpulan politik campuran, bangsa Indonesia dan bukan bangsa Indonesia, yang menuju kearah kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>66</sup> A.K Pringgodigdo. *Op. Cit*, hal.xi

<sup>67</sup> *Ibid.* hal.xiii

<sup>68</sup> Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit*, hal. 60

<sup>69</sup> A.K Pringgodigdo. *Op. Cit*, hal. 1-19

Ketiga, perkumpulan campuran yang bertujuan Indonesia tetap dalam ikatan dengan negeri Belanda.

- a. Perkumpulan politik asli bangsa Indonesia baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan.

Dalam perkumpulan politik asli bangsa Indonesia yang bersifat nasional terdapat dua organisasi besar pada masa itu, Boedi Oetomo dan Sarekat Islam. Boedi Oetomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1908. Pada awalnya hanya bergerak dalam bidang pengajaran dan kebudayaan Jawa. Baru pada tahun 1917 Boedi Oetomo menetapkan program politik dalam organisasinya. Sedangkan Sarekat Islam sudah dari awal pendiriannya sudah berpolitik. SI didirikan di Solo pada akhir tahun 1911 oleh H. Samanhudi. Bermula sebagai Sarekat Dagang Islam, berdasarkan koperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia dibawah panji-panji Islam.

Dalam politik asli Indonesia bersifat kedaerahan terdapat beberapa nama perkumpulan-perkumpulan seperti: Pasundan, Sarekat Sumatera, Sarekat Ambon, dan Perserikatan Minahasa. Perkumpulan yang bersifat kedaerahan adalah perkumpulan yang didirikan berdasarkan daerah-daerah tempat pendirinya berasal maupun bertempat tinggal. Selain untuk memajukan daerahnya masing-masing, ada juga perkumpulan daerah yang menuntut kemerdekaan dari pemerintah kolonial.

- b. Perkumpulan campuran, bangsa Indonesia dan bukan bangsa Indonesia, yang menuju ke arah kemerdekaan Indonesia.

Perkumpulan campuran adalah perkumpulan yang terdiri dari orang-orang Eropa dan juga penduduk pribumi, dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan yang masuk dalam golongan ini diantaranya adalah: Insulinde, *Indische Partij*, dan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV)*.

Insulinde, kemudian National Indische Partij, didirikan di Bandung pada tahun 1907. Insulinde adalah untuk bangsa Eropa yang lahir di Indonesia dan yang berkehendak terus tinggal di Indonesia. Insulinde merupakan perkumpulan peranakan untuk kepentingan sendiri. Tujuannya adalah untuk kemajuan dan kemakmuran negeri.

Selain Insulinde yang nasionalis, terdapat pula ISDV yang beraliran komunis dan menginginkan kemerdekaan Indonesia di bawah negara komunis. Organisasi ini didirikan oleh orang Belanda asli H.J.F.M Sneevliet. Berdiri pada tahun 1914 di Semarang dengan tujuan menyebarkan paham marxis.

c. Perkumpulan campuran yang bertujuan Indonesia tetap dalam ikatan dengan negeri Belanda.

Tidak lama sebelum dan sesudah *Volksraad* berdiri, timbul beberapa perkumpulan yang juga campuran, tetapi yang menginginkan Indonesia tetap dalam ikatan dengan negeri Belanda. Pada umumnya perkumpulan ini ingin agar Hindia Belanda diberikan pemerintahan sendiri berdasarkan demokrasi, tetapi tetap dalam ikatan dengan negeri Belanda. Selain itu juga terdapat perkumpulan campuran berdasarkan agama, terutama Kristen, untuk memajukan bangsa. Diantara

perkumpulan ini ialah: *Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond* (NIVB), *Christelijke Etische Partij* (CEP), *Indische Katholieke Partij* (IKP), dan *Polietieke Economische Bond* (PEB). Perkumpulan ini sebagian besar bersifat asosiasi dengan tujuan untuk menanamkan kebudayaan Belanda kepada masyarakat di Hindia Belanda.

## 2. Pergerakan Sarekat Sekerja

Timbulnya pergerakan politik diikuti oleh pergerakan kaum sekerja, untuk memperbaiki kedudukannya. Timbulnya pergerakan sarekat kerja ini terdiri dari empat faktor. Pertama ialah karena munculnya organisasi politik, pikiran kaum buruh lebih terbuka untuk berorganisasi. Kedua, adanya perkumpulan sarekat kerja bangsa Eropa. Faktor ketiga pergerakan sarekat kerja timbul dalam waktu perang dunia I, yaitu merosotnya kehidupan ekonomi. Faktor terakhir adalah keinginan dari organisasi politik untuk mendekati kaum sekerja, untuk memperkuat organisasinya dengan mempergunakan sarekat kerja.<sup>70</sup>

Di antara perkumpulan sarekat kerja adalah: *Vereniging van Spoor en Tramwegpersoneel* (VSTP), perkumpulan dari semua pegawai angkutan darat kereta api dan trem. Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB), *Personeel Fabriek Bond* (PFB), *Perkumpulan Sarekat Pabrik* (PSP), dan *Persatuan Pergerakan Kaum Buruh* (PPKB).

## 3. Pergerakan Keagamaan

Pada masa itu juga terdapat pergerakan dalam bidang keagamaan. Dari golongan pribumi salah satunya adalah Muhammadiyah, didirikan oleh H. Ahmad

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hal.16

Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuannya untuk memajukan pengajaran berdasarkan agama, pengertian ilmu agama dan hidup menurut peraturan agama. Pada awal pendiriannya perkumpulan ini hanya bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan saja, namun anggotanya bebas untuk terjun dan bergerak dalam bidang politik.

Selain itu, pada awal abad ke-20 juga banyak berdiri organisasi-organisasi keagamaan yang bersifat lokal. Organisasi ini dibentuk secara spontan oleh pemuka agama di daerah tempat tinggalnya. Sama dengan Muhammadiyah, organisasi tersebut hanya bergerak dalam bidang sosial, agama, dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Diantara organisasi tersebut adalah Djamiat Khair yang didirikan di Jakarta 17 Juli 1905. Organisasi ini terbuka bagi setiap muslim tanpa membedakan asal-usul. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan dan ruang lingkungannya terbatas hanya di Jakarta.<sup>71</sup> Selain itu terdapat juga organisasi Islam Al-Irsyad. Berdiri pada tahun 1913 dan kemudian mendapatkan pengakuan legal dari pemerintah kolonial pada tahun 1915. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dalam perkembangannya bertujuan untuk memajukan umat Islam. Organisasi ini memiliki banyak cabang di Pulau Jawa seperti di Cirebon, Bumiayu, Tegal, Pekalongan Surabaya, dan Lawang.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* Jakarta: LP3ES. 1996, hal. 68-71

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 73-75

Dengan lahirnya organisasi-organisasi pada awal abad ke-20 dengan beragam alirannya telah mewarnai pergerakan nasional. PEB sebagai partai politik campuran yang menginginkan Hindia Belanda tetap dalam ikatan dengan negeri Belanda mempunyai tujuan untuk memajukan Hindia Belanda. Walaupun untuk mencapai tujuannya PEB seringkali bertentangan dengan kaum golongan pergerakan nasional.

